



2025

RENCANA KERJA (RENJA)

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327
Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com
Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

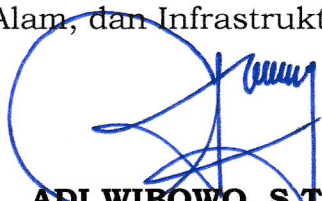
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

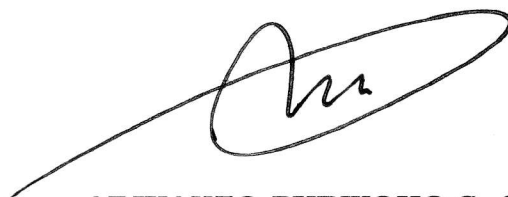
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya
Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



ARIYANTO PURWOKO S, S.E
NIP. 199401222019031004

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEL, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

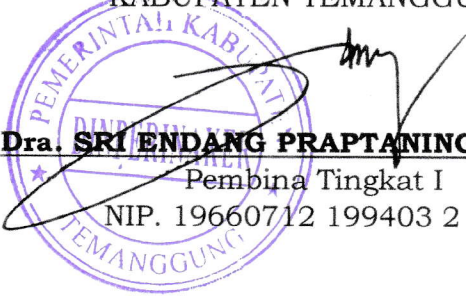
Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 5 Juli 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN VERIFIKASI ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 7

 1.3 Maksud dan Tujuan 10

 1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA..... 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga
 Kerja 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan
 Tenaga Kerja Tahun 2019 – 2023 11

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan
 Tenaga Kerja 31

 2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) 31

 2.3 Data Pokok 38

 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
 Perindustrian dan Tenaga Kerja 44

 2.5 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD 49

 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 64

 2.7 Inovasi Perangkat Daerah 64

 2.8 Penghargaan 65

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 66

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 66

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan
 Tenaga Kerja 66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 70

 4.1 Program dan Kegiatan 70

BAB V PENUTUP 86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2023 12

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2024 Triwulan I 20

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung 32

Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 39

Tabel 2.5 Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 39

Tabel 2.6 Persentase Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 39

Tabel 2.7 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 40

Tabel 2.8 Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih Melalui Perluasan Kesempatan Kerja Kabupaten Temanggung, Tahun 2019 – 2024 Tw I..... 40

Tabel 2.9 Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I..... 41

Tabel 2.10 Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I..... 41

Tabel 2.11 Persentase Kebersertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 41

Tabel 2.12 Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 42

Tabel 2.13 Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I 42

Tabel 2.14 Presentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai melalui Mediasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I..... 43

Tabel 2.15 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I..... 43

Tabel 2.16 IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung, Tahun 2019 – 2024 Tw I..... 43

Tabel 2.17 Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan Kabupaten
Temanggung Tahun 2019 – 2024 Tw I 44

Tabel 2.18 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 49

Tabel 2.19 Usulan program dan kegiatan masyarakat..... 64

Tabel 2.20 Daftar Inovasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 64

Tabel 2.21 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023 65

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 67

Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025..... 71

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

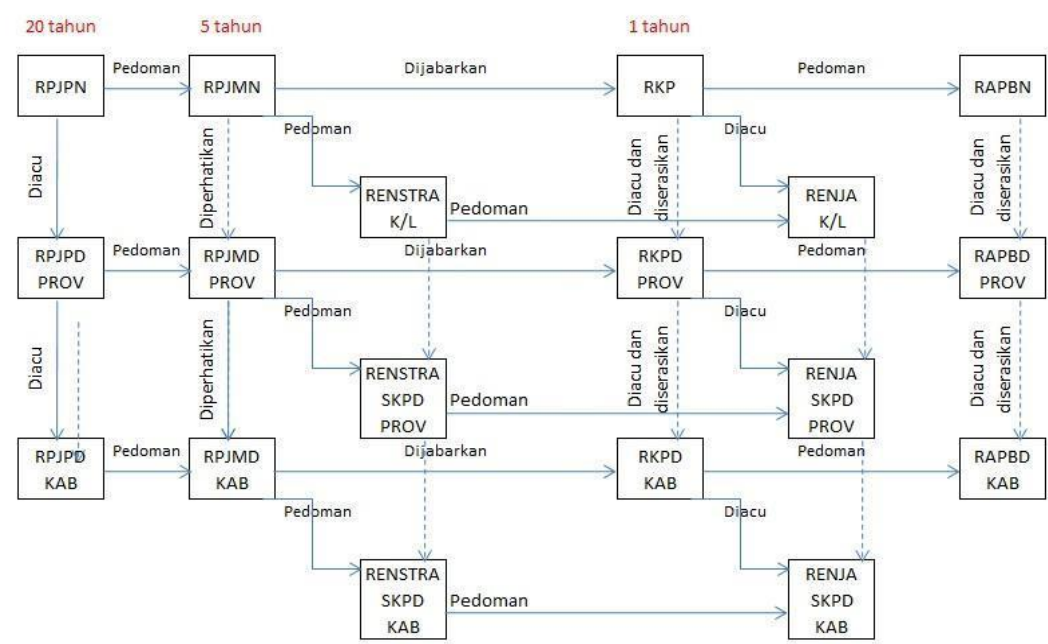
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 triwulan I sebagai tahun ke-satu pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Tahun 2023

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	12	7.154.823.861	12	5.518.801.896	5.310.045.038	12	5.230.377.794	100	98,50
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	1	17.616.000	0	0	0	0	0,00
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	12	10.000.000	11.000.000	12	10.992.500	100	99,93
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	20.139.000	32.639.000	1	32.621.750	100	99,95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	1	17.991.450	17.891.450	1	17.811.200	100	99,55

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000	12	42.324.000	20.000.000	12	19.614.500	100	98,07
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	70.000.000	12	70.000.000	47.000.000	12	46.978.628	100	99,95
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000	6.000.000	12	5.930.000	100	98,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	89.988.000	12	110.000.000	110.000.000	12	72.965.253	100	66,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	602.320.001	587.860.950	12	563.300.562	100	95,82
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	80.000.000	25	68.000.000	94.884.531	25	88.304.992	100	93,07

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Operasional atau lapangan											
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	82.496.050	132.494.570	1	131.952.697	100	99,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	20.000.000	10	10.000.000	30.500.000	10	30.275.000	100	99,26
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	45		45			67,86		100	
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	65		65			72,39		100	
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	45		45			64,29		100	
f	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi											

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	288	400.000.000	288	600.425.000	847.525.500	288	811.027.775	100	95,69
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0,00
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
		Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	65		65			84,88		100	
		Tingkat setengah pengangguran	%	5,7		5,7			4,4		100	
		Presentase tenaga kerja formal	%	31		31			24,81		80,03	
g	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota											
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	140	0	140	0	390.191.000	140	388.344.786	100	99,53
h	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota											

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	16	100.000.000	16	115.000.000	0	0	0	0	0,00
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
		Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	79		79			90,83		100	
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	58		58			81,58		100	
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	45		45			71,05		100	
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100		100			100		100	
i	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	80.000.000	1	135.000.000	30.000.000	1	29.930.550	100	99,77

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
		Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	35		35			70,46		100	
		Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	5,3		5,3			12,29		100	
j	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Doku men	1	70.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Doku men	1	60.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0,00

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku men	1	350.000.000	1	656.660.000	646.291.800	1	632.876.812	100	97,92
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Doku men	1	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0,00
6	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											
k	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Doku men	1	0	1	900.000.000	150.000.000	1	149.859.999	100	99,91
	JUMLAH				9.326.811.861		9.288.773.397	8.464.323.839		8.263.164.798		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bula n	44	5.167.159.3 08	44	5.159.466.9 34	5.810.830.818	3	1.029.487.72 1	3	1.029.48 7.721	25	17,72
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	1	10.000.000	10.000.000	0,2 5	620.000	0,2 5	620.000	25	6,20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	28.639.000	1	23.639.000	23.639.000	0,2 5	6.037.700	0,2 5	6.037.70 0	25	25,54
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	24.491.450	1	19.491.450	19.491.450	0,2 5	2.189.500	0,2 5	2.189.50 0	25	11,23

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	27.000.000	12	22.000.000	22.000.000	3	2.373.500	3	2.373.500	25	10,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	78.866.000	12	73.866.000	73.866.000	3	16.829.200	3	16.829.200	25	22,78
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	15.000.000	12	10.000.000	10.000.000	3	0	3	0	25	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	115.000.000	12	110.000.000	85.000.000	3	19.478.030	3	19.478.030	25	22,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	586.760.950	12	581.760.950	581.760.950	3	136.732.673	3	136.732.673	25	23,50
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	88.884.531	25	83.884.531	83.884.531	4	8.404.720	4	8.404.720	16	10,02
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	137.494.570	1	132.494.570	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	32.000.000	10	27.000.000	27.000.000	1	500.000	1	500.000	10	1,85
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	73		72			43,8		43,8		60,89	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	82		80			11,4		11,4		14,20	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi													
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Orang	300	858.521.250	208	850.000.000	800.000.000	0	573.500	0	573.500	0	0,07
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
		Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	37		35			21,33		21,33		60,94	
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	32		30			53,07		53,07		100	
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	1,3		1			0		0		0	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	94		90			66,44		66,44		73,82	
f	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota													

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1500	70.000.000	1000	50.000.000	10.000.000	125	2.726.500	125	2.726.500	62,5	27,27
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	4	27.000.000	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	140	307.010.000	128	100.000.000	430.000.000	0	886.500	0	886.500	0	0,21
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
		Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	83,4		82,37			88,49		88,49		100	
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	75		69,75			81,58		81,58		100	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	47		45			67,54		67,54		100	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	%	100		100			100		100		100	
g	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota													
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	101.002.500	1	0	65.000.000	0,1	1.350.000	0,1	1.350.000	10	2,08
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
		Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	85,2		71,62			58,90		58,90		82,24	
		Persentase Pembinaan IKM tembakau lembut	%	26,53		15,3			4,42		4,42		28,89	
h	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
									I					
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Doku men	1	250.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku men	1	468.120.250	1	160.000.000	335.000.000	0,25	63.180.200	0,25	63.180.200	25	18,86
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Doku men	1	100.000.000	1	50.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH							8.492.472.749				1.291.369.744		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Pada tahu 2023 tidak ada capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau bekerja;
 - c. Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang;
 - d. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan;
 - e. Tingkat setengah pengangguran;
 - f. Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - g. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK;
 - h. Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial;
 - i. Persentase perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama;
 - j. Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah;
 - k. Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - l. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - m. Perluasan Kesempatan Kerja
 - n. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - o. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - p. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2023 tidak ada sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi target kinerja yang direncanakan.
5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan capaian 99,61%. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini. Upaya yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu :
 - 1) Menumbuhkan wirausaha baru dengan melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh dunia kerja baik pada sektor industri selain industri kayu, pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa, dll.

- 2) Melakukan penguatan jejaring dengan perusahaan untuk melakukan recruitment terbuka
 - 3) Mengadakan pameran kesempatan kerja (jobfair) untuk mempertemukan antara Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan Pencari Kerja agar terjadi matching;
 - 4) Penyuluhan bimbingan jabatan melalui aplikasi konseling jaminan kehilangan pekerjaan;
 - 5) Melakukan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM.
- b. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB. Hal ini karena Adanya penurunan permintaan produksi industri pengolahan kayu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang menyebabkan ada perusahaan yang tutup dan terjadinya PHK , dimana industri tersebut merupakan sektor industri utama di Kabupaten Temanggung. Upaya yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja yaitu:
- 1) Mendorong pengembangan industry kecil menengah untuk terus maju dan berkembang utamanya di sektor industri unggulan Kabupaten Temanggung (9 Sektor produk unggulan)
 - 2) Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM dapat mengembangkan usahanya.
6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
- a. Persentase Tenaga Kerja formal. Indikator ini menggunakan data realisasi BPS. Hal yang menghambat pencapaian kinerja program ini adalah masih kurangnya peluang kerja formal, kompetensi SDM kurang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu memberikan pelatihan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan kerja formal.
7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2023 tidak ada sub kegiatan yang realisasi kinerjanya tidak sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,67%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB;
Capaian Kinerja : 97 % kategori Baik
 - b. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Capaian Kinerja : 99,6 % kategori Baik
2. Sasaran Program
 - a. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
 - b. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
Capaian Kinerja : 93,34 % kategori Baik
 - c. Meningkatnya Hubungan Industrial
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
 - d. Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Industri
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
 - e. Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel 2.3 Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2024 **(Laporan IKPD)**
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW 1 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,8	76,15	76,2	76,25	75,8	-	-	99,54	Sangat Tinggi				
2	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	%	26,19	27,2	27,25	27,3	25,92	-	-	95,29	Sangat Tinggi				
3	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72,39	72	72,56	73	43,84	-	-	60,88				Rendah	
4	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	%	n.a	80	81	82	11,36	-	-	14,2					Sangat Rendah
5	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	84,88	35	36	37	21,33	-	-	60,95				Rendah	
6	Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	n.a	1	1,2	1,3	0	-	-	0					Sangat Rendah
7	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	n.a	30	31	32	53,07	-	-	100	Sangat Tinggi				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW 1 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
8	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	n.a	90	92	94	66,44	-	-	73,83			Sedang		
9	Presentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	90,83	82,37	83,37	83,4	88,49	-	-	100	Sangat Tinggi				
10	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	81,58	69,75	70	75	81,58	-	-	100	Sangat Tinggi				
11	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	45	46	47	67,54	-	-	100	Sangat Tinggi				
12	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	-	-	100	Sangat Tinggi				
13	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	70,46	71,62	78,2	85,2	58,9	-	-	82,25		Tinggi			
14	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	12,29	15,3	20,95	26,53	4,42	-	-	28,89					Sangat Rendah

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan predikat Sangat Tinggi ada 7 (tujuh) indikator terdiri dari:

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja serta adanya peningkatan penduduk yang bekerja serta adanya peningkatan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

b. Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut banyak peningkatan pertumbuhan industri kecil yang berkembang, jumlah industri bertambah sehingga lapangan pekerjaan juga bertambah.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut karena adanya penurunan permintaan produksi industri pengolahan kayu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang menyebabkan ada perusahaan yang tutup dan terjadinya PHK , dimana industri tersebut merupakan sektor industri utama di Kabupaten Temanggung.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM dapat mengembangkan usahanya. Serta terus mendorong berbagai pihak untuk selalu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri guna mendorong industri-industri kecil di Temanggung terus maju dan berkembang.

- c. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat tentang peran dinas cukup meningkat sehingga dinas mendapat kemudahan akses penyuluhan di tingkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan penyuluhan maupun perjalanan dinas.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjalin komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang diadakan oleh Desa.
- d. Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengusaha menyadari resiko jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi perusahaan yang tidak sepenuhnya baik dalam hal penjualan produk.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan.
- e. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengusaha menyadari pentingnya pekerja sebagai bagian dari faktor produksi barang dan jasa dalam meningkatkan profit.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih cukup banyak pekerja yang produktivitas kerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan pengusaha.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan sosialisasi UMK kepada perusahaan.
- f. Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah pengusaha menyadari bahwa kesejahteraan pekerja adalah salah satu

hak pekerja yang penting untuk diadakan atau dilaksanakan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum semua perusahaan mampu menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk pekerja karena menyangkut keuangan dan area yang tersedia
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pembinaan kesejahteraan pekerja kepada perusahaan.

g. Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah para pihak telah memahami prosedur penyelesaian perselisihan.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah perundingan bipartit yang dilakukan oleh para pihak tidak mencapai kesepakatan.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan peningkatan kapasitas SDM HRD dan SDM pekerja/serikat pekerja.

2. Capaian indikator dengan predikat Tinggi ada 1(satu) indikator yaitu:

a. Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya fasilitasi pelatihan yang diberikan kepada IKM industri.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kesulitan persyaratan pengurusan ijin cukai.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembangunan sarana prasarana Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau.

3. Capaian indikator dengan predikat Sedang ada 1 (satu) indikator yaitu:

a. Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah layanan dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kemudahan pada

CPMI maupun P3MI untuk berproses.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah dokumen data dukung yang diupload tidak memenuhi syarat. Banyak CPMI yang belum memahami teknologi sehingga pendaftaran tidak lengkap dan lupa akun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memperbanyak penyuluhan tentang proses penempatan ke luar negeri secara mudah dan aman.
4. Capaian indikator dengan predikat Rendah ada 2 (dua) indikator terdiri dari:
- a. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah animo masyarakat yang tinggi tentang minatnya mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan kuota pelatihan yang tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pengajuan perencanaan anggaran pelatihan melalui APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT.
 - b. Persentase pencari kerja yang ditempatkan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meningkat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah pencari kerja masa kini cukup memilih milih pekerjaan serta kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan serta meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa.
5. Capaian indikator dengan predikat Sangat Rendah ada 2 (dua) terdiri dari:

- a. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah ketersedianya anggaran untuk sosialisasi peraturan tentang program kegiatan lembaga pelatihan kerja swasta.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran pengelola Lembaga pelatihan kerja untuk mematuhi aturan program kegiatan sesuai peraturan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pertemuan rutin dengan lembaga pelatihan kerja untuk mewujudkan lembaga pelatihan kerja yang sehat dengan program kegiatan sesuai dengan peraturan.
- b. Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan perluasan kesempatan kerja cukup tinggi.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kegiatan belum dilaksanakan pada triwulan I dan baru akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024 kesadaran pengelola Lembaga pelatihan kerja untuk mematuhi aturan program kegiatan sesuai peraturan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menyegerakan pelaksanaan pelatihan saat anggaran telah dapat diakses.
- c. Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lumbutan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya banyaknya Sumber bahan baku tembakau.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terbatasnya teknologi pengolahan tembakau.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menjalin komunikasi dengan para pihak terkait, dalam rangka peningkatan teknologi pengolahan tembakau.

2.3 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Ketenagakerjaan dan Data Pokok Bidang Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,09	58,73	74,01	74,01	75,80	75,80

b. Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Realisasi persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	240	320	112	80	464	128
Jumlah pendaftar pelatihan	352	545	322	112	641	292
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	68,18	58,72	34,78	71,43	72,39	43,84

c. Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina

Realisasi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina tahun 2019-2024 Tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah LPKS yang dibina	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	5
Jumlah LPKS keseluruhan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	44

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	14,20

- d. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
- Realisasi persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2019-2024 Tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	2.357	602	1.749	773	679	125
Jumlah pencari kerja terdaftar	3.406	1088	2.242	1.442	800	586
Presentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%)	69,20	55,33	78,01	53,61	84,88	21,33

- e. Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja
- Realisasi pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja tahun 2019 – 2024 Tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih Melalui Perluasan
Kesempatan Kerja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
Jumlah pencari kerja terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	586
Presentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0

- f. Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan
- Realisasi persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan Dan
Bimbingan Jabatan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	311
Jumlah pencari kerja terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	586
Presentase Pencari Kerja Yang Mendapat Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	53,07

- g. Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur
- Realisasi persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur tahun 2019 – 2024 Tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
Terfasilitasi Sesuai Prosedur
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah CPMI yang terfasilitasi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	99
Jumlah CPMI terdaftar	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	149
Presentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	66,44

- h. Persentase Kebersertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
- Realisasi Persentase kebersertaan program BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019-2024 Tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Persentase Kebersertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah pekerja peserta BPJS	14.467	18.223	16.328	24.672	21.472	21.241

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah pekerja total	27.751	27.751	26.732	29.062	23.641	24.003
Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	52,13	65,67	61,08	84,89	90,83	88,49

- i. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK
- Realisasi Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK tahun 2019 – 2024 Tw I dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK	71	84	82	91	93	93
Jumlah Perusahaan	397	397	119	119	114	114
Persentase perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK (%)	52,13	65,67	61,08	84,89	90,83	88,49

- j. Persentase Terpenuhiya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
- Realisasi persentase terpenuhiya fasilitas kesejahteraan pekerja tahun 2019-2024 Tw I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Persentase Terpenuhiya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja	n.a	n.a	n.a	n.a	77
Jumlah Perusahaan	n.a	n.a	n.a	n.a	114
Persentase Terpenuhiya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	n.a	n.a	n.a	n.a	67,54

- k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai melalui Mediasi
- Realisasi Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi tahun 2019-2024 Tw I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai
melalui Mediasi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi	3	14	17	15	20	16
Jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi	2	13	14	14	20	16
Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Selesai melalui Mediasi	66,67	92,86	82,35	93,33	100	100

2. Data Pokok Bidang Perindustrian
- a. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
- Realisasi Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,21	27,47	27,47	27,47	26,19	26,19

- b. Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah
- Realisasi Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Presentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi	n.a	n.a	60	210	229	215
Jumlah IKM Unggulan Daerah	n.a	n.a	325	325	325	365

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	n.a	n.a	18,46	64,62	70,46	58,90

- c. Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan
- Realisasi Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan tahun 2019-2024 Tw I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2024 Tw I

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Tw I
Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	n.a	n.a	75	355	440	160
Jumlah IKM Tembakau	n.a	n.a	3.580	3.580	3.580	3620
Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	n.a	n.a	2,09	9,92	12,29	4,42

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 14 indikator terdapat 9 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Hal ini disebabkan karena data TPAK diperoleh dari data publikasi BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak memiliki metode untuk perhitungan TPAK. Selain itu hal ini disebabkan juga karena menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja

di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung.

- Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Hal ini disebabkan karena data pada indikator ini diperoleh dari data publikasi BPS dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak memiliki metode perhitungan. Selain itu hal ini disebabkan juga adanya penurunan permintaan produksi industri pengolahan kayu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang menyebabkan ada perusahaan yang tutup dan terjadinya PHK , dimana industri tersebut merupakan sektor industri utama di Kabupaten Temanggung
- Indikator Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Hal ini dikarenakan keterbatasan kuota pelatihan yang tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.
- Indikator Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina
Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengelola Lembaga pelatihan kerja untuk mematuhi aturan program kegiatan sesuai peraturan.
- Indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan
Hal ini disebabkan pencari kerja masa kini cukup memilih milih pekerjaan serta kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen.
- Indikator Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja
Hal ini disebabkan karena anggaran belum dapat diakses atau masih dalam tahap perubahan sehingga pelatihan perluasan kesempatan kerja belum dapat dilaksanakan dan baru bisa dilaksanakan mulai triwulan II tahun 2024.
- Indikator Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur
Hal ini disebabkan karena dokumen data dukung yang diupload oleh CPMI tidak memenuhi syarat. Banyak CPMI yang belum memahami teknologi sehingga pendaftaran tidak lengkap dan lupa akun.

- Indikator Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah

Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha mengalami kesulitan persyaratan pengurusan ijin cukai.

- Indikator Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan

Hal ini disebabkan karena terbatasnya teknologi pengolahan tembakau.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, antara lain :

- Ketersediaan anggaran yang terbatas mempersempit ruang gerak dalam penanganan pencari kerja.
- Penanganan terhadap masalah pengangguran dan disabilitas belum secara keseluruhan dan berkelanjutan, baru dapat dilaksanakan secara parsial karena keterbatasan anggaran.
- Lowongan kerja yang tersedia didominasi untuk perempuan pada 18 s.d 30 tahun, sehingga pencari kerja perempuan di atas usia tersebut dan pencari kerja laki-laki kesulitan dalam mencari pekerjaan.
- Belum memiliki sarana perhitungan yang efektif untuk mendata pengangguran secara riil ditingkat desa dan kecamatan.
- Beberapa peralatan pelatihan yang belum ter-upgrade
- Kurangnya kuota pelatihan
- Sarana dan prasarana untuk pelatihan yang kurang memadai
- Masih banyak Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan PKWT. Padahal jenis pekerjaan yang dilakukan Pekerja/Buruh bukan jenis pekerjaan yang bisa di PKWT-kan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Masih banyak Pengusaha yang belum membuat Struktur dan Skala Upah. Padahal Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Juncto Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Junctis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 telah mewajibkan;

- Masih banyak Pengusaha yang belum membayar upah Pekerja/Buruh sesuai dengan UMK. Padahal tahun 2024 ini Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan telah pula diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam Pasal 88E ayat (2) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021;
- Masih cukup banyak Pengusaha yang belum mengikutsertakan seluruh Pekerja/Buruh dalam semua Program BPJS Ketenagakerjaan, seperti JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. PDS Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 telah mewajibkan Pengusaha mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam Program JP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 telah mewajibkan Pengusaha mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam Program JHT;
- Masih banyak Pengusaha yang belum memahami cara membuat Peraturan Perusahaan dan tata cara mengajukan pengesahannya;
- Masih banyak Pengusaha dan/atau manajemen dan/atau HRD dan Pengurus SP/SB Unit Kerja yang belum memahami cara membuat Perjanjian Kerja Bersama dan tata cara pendaftarannya;
- Masih banyak Pekerja/Buruh/Pengurus SP/SB yang belum sepenuhnya memahami fungsi SP/SB dalam memperjuangkan hak-hak Pekerja/Buruh dan keluarganya; dan

- Masih banyak HRD sebagai wakil Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang belum mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian PHI
- Produktifitas industri kecil masih rendah.
- Tingkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku industri kecil belum optimal dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing dipasaran.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melegalkan usaha dan produk yang dihasilkan.
- Kualitas dan standar mutu produk belum optimal
- Kesadaran industri kecil masuk akun SIINas sangat rendah
- Kepatuhan industri dalam pelaporan perkembangan usaha melalui aplikasi SIINas masih minim

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Mendapatkan anggaran sesuai kebutuhan.
- Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai.
- Berusaha menyusun metode dan strategi untuk mendapatkan data pengangguran ditingkat desa dan kecamatan secara riil.
- Adanya bantuan peralatan pelatihan
- Adanya penambahan anggaran agar kuota pelatihan bisa memenuhi animo peserta pelatihan
- Pemeliharaan sarana prasarana pelatihan
- Agar melaksanakan monitoring secara berkala untuk memperoleh data ketenagakerjaan dan sarana hubungan industrial
- Dilaksanakan pemberdayaan HRD sebagai Wakil Pengusaha dan Pekerja/Buruh/Pengurus SP/SB secara terus menerus melalui kegiatan peningkatan kapasitas baik klasikal maupun non klasikal (outbond/studi informasi)
- Pendampingan, pelatihan dan fasilitasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing dipasaran

- Pendampingan, pelatihan dan fasilitasi kepada IKM tentang manajemen mutu dan standarisasi produk
- Pendampingan dan sosialisasi IKM tentang perizinan usaha industri dan SIINas.

2.5 **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
 - b. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.18
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.918.911.799		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.633.469.818	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.700.911.799		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.865.469.818	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.810.830.818		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.910.830.818	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang /bula n	5.810.830.818		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/ bulan	5.910.830.818	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					148.996.450		Administrasi Umum Perangkat Daerah					157.639.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	23.639.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.639.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	19.491.450		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	21.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lapora n	22.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	23.000.000	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lapora n	73.866.000		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	76.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					620.200.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					652.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lapora n	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lapora n	85.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapora n	523.200.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	550.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.884.531
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	83.884.531
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tema nggu ng	Jumlah mebel yang dipelihara	8	Unit	7.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tema nggu ng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	20.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					145.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	85.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Tema nggu ng	Jumlah mebel yang dipelihara	8	Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tema nggu ng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	Unit	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1	Unit	10.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tema nggu ng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1	Unit	30.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						0	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						0	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	- Kab. Tema nggu ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Doku men	0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	- Kab. Tema nggu ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokum en	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					13.000.000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					0
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kab. Temayung, ngg, Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	160	Orang	0
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					13.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Kab. Temayung, ngg, Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20	Lembaga	13.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					125.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					878.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					865.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kab. Temayung, ngg, Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan	160	Orang	865.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					13.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Kab. Temayung, ngg, Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20	Lembaga	13.000.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					610.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					98.000.000
	Pelayanan antar Kerja	- Kab. Temayang, nggu ng, Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	200	Orang	10.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Kab. Temayang, nggu ng, penyuluhan dan bimbingan jabatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	480	orang	10.000.000
	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n	- Kab. Tema nggu ng, Mendapatkan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan	10	Orang	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					583.000.000	
	Pelayanan antar Kerja	- Kab. Temayang, nggu ng, Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	200	Orang	88.000.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Kab. Temayang, nggu ng, penyuluhan dan bimbingan jabatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	480	orang	10.000.000	
	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n	- Kab. Tema nggu ng, Mendapatkan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan	10	Orang	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Fasilitasi Layanan ULD			
	Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temayang nggu ng, Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	75	Orang	78.000.000
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					27.000.000
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Kab. Temayang nggu ng, Sem ua Keca mata n,	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensiny a	4	Orang	27.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi Layanan ULD				
	Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temayang nggu ng, Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	120	Orang	435.000.000	35Jt untuk Teman Alula (Tempat Jualan Alumni Pelatihan)
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota					27.000.000	
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Kab. Temayang nggu ng, Sem ua Keca mata n,	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensiny a	4	Orang	27.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
		Sem ua Kel/ Desa							Sem ua Kel/ Desa					
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					80.000.000		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					280.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					80.000.000		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					280.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	Perkara	80.000.000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber dampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10	Perkara	80.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	- Kab. Tema nggu ng,	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lemba ga	0		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota	- Kab. Tema nggu ng,	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembag a	200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						78.670.713	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						50.620.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						18.670.713	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						50.550.000.000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						18.670.713	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						50.550.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Tema nggu ng, Sem ua Keca mata n, Sem	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	1	Doku men	18.670.713		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Tema nggu ng, Sem ua Keca mata n, Sem	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokum en	200.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan potensi unggulan daerah

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
		ua Kel/ Desa							ua Kel/ Desa					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Tema nggu ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri	1	Doku men	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Kab. Tema nggu ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokum en	50.000.000.000	Pembangunan APHT (Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	- Kab. Tema nggu ng, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1	Doku men	0		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	- Kab. Tema nggu ng, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1	Dokum en	350.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Peran Serta Masyarakat		Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat					Peran Serta Masyarakat		Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat				
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						70.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Tembung, Semau Kecamatan, Mata, Semau Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	1	Dokumen	0
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					60.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					60.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Tembung, Semau Kecamatan, Mata, Semau Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	1	Dokumen	70.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja Program/Keg iatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semarang, Kecamatan, Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	60.000.000		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Kab. Temanggung, Semarang, Kecamatan, Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	0	
JUMLAH						6.997.582.512	JUMLAH						59.253.469.818	

Sumber : (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabe 2.19
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

NIHIL

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 1(satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.20
Daftar Inovasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Training Anti Gabut	Semua SDM Dinperi naker	APBDes	Pelatihan jemput bola oleh Dinperinaker yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kabupaten Temanggung, untuk menyiapkan lulusan pelatihan yang terampil guna memasuki dunia kerja maupun merintis usaha	Lulusan Pelatihan yang Terampil	SDM Lulusan pelatihan yang terampil sehingga siap membuka usaha baru maupun masuk ke dunia kerja	Dinperinaker / 2022

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke 2 Tahun 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER
2	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke 2 Tahun 2023	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER
3	Piagam Penghargaan atas Pencapaian Target Pendataan Industri Kecil Tahun 2023 Melalui SIINas Sebesar 118%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merujuk pada sasaran dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perindustrian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024-2026 adalah “Meningkatnya perekonomian daerah” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja dan Meningkatkan Nilai Usaha Industri”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu;
3. Dan Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumenn renstra 2024-2026)

Tabel 3.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya Perekonomian Daerah						
	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,2	76,25
	Meningkatnya Nilai Usaha Industri		Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	%	27,25	27,3
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72,56	73
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	%	81	82
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	36	37
			Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	1,2	1,3

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	31	32
			Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	92	94
		Program Hubungan Industrial	Presentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	83,37	83,4
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	70	75
			Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	46	47
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	78,2	85,2
			Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	20,95	26,53

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.818.911.799	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.818.911.799	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.700.911.799	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.700.911.799	0
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.810.830.818	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.810.830.818	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.830.818		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.810.830.818	0
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.996.450	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.996.450	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.639.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.639.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.450		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.450	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.866.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.866.000	0
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.200.000	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.200.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.200.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.200.000	0

RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.884.531	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.884.531	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.884.531		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.884.531	0
	Pemeliharaan Mebel	7.000.000		Pemeliharaan Mebel	7.000.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	613.000.000	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	613.000.000	0
e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	600.000.000	e	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	600.000.000	0
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000	0
f	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.000.000	f	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.000.000	0
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.000.000		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	13.000.000	0
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	425.000.000	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	425.000.000	0
g	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	398.000.000	g	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	398.000.000	0
	Pelayanan antar Kerja	88.000.000		Pelayanan antar Kerja	88.000.000	0
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10.000.000		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10.000.000	0

RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50.000.000		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50.000.000	0
	Perluasan Kesempatan Kerja	250.000.000		Perluasan Kesempatan Kerja	250.000.000	0
h	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	27.000.000	h	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	27.000.000	0
	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.000.000		Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	27.000.000	0
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	80.000.000	3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	80.000.000	0
i	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	i	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	0
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	0
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	403.670.713	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	403.670.713	0
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	343.670.713	4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	343.670.713	0
j	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	343.670.713	j	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	343.670.713	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	18.670.713		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	18.670.713	0

RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana	Pagu Indikatif
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	325.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	325.000.000	0
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000	0
k	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	k	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	0
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60.000.000		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60.000.000	0
JUMLAH		8.222.582.512	JUMLAH		8.222.582.512	-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Rancangan Awal dengan pagu Penetapan Renja Tahun 2025 sebesar Rp. 1.225.000.000,- Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat penambahan anggaran bersumber dari DBHCHT dan usulan aspirasi. Beberapa sub kegiatan yang terdapat kenaikan pagu indikatif antara lain:

1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 600.000.000,- sumber dana DBHCHT. Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi.
2. Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja bertambah sebesar Rp. 78.000.000,- dari usulan aspirasi untuk kegiatan pendampingan inkubasi bisnis dan pemagangan.
3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan bertambah sebesar Rp.50.000.000,- untuk kegiatan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
4. Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja bertambah sebesar Rp. 250.000.000,- bersumber dana DBHCHT untuk kegiatan pelatihan produktivitas.
5. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat bertambah sebesar Rp. 250.000.000 bersumber dana DBHCHT.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.818.911.799				7.818.911.799		
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							7.818.911.799				7.818.911.799		
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.700.911.799				6.700.911.799		
2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.810.830.818					5.810.830.818		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung		44 Orang/Bulan		5.810.830.818	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	5.810.830.818	
2	07	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							148.996.450					148.996.450	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		10.000.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		23.639.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.639.000
2	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Paket		19.491.450	DAU		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.491.450
2	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Temanggung		12 Laporan		22.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Temanggung		12 Laporan		73.866.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.866.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								620.200.000					620.200.000
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung		12 Laporan		12.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Temanggung		12 Laporan		85.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Ha sil Ke gia tan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Temang gung		12 Lapora n		523.200.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	523.200.000
2	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120.884.531					120.884.531
2	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Temang gung		17 Unit		83.884.531	DAU		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	17 Unit	83.884.531
2	0	0	2.	0	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara		Kab. Temang gung		8 Unit		7.000.000	DAU		Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit	7.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kab. Temanggung		10 Unit		20.000.000	DAU		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	20.000.000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		Kab. Temanggung		1 Unit		10.000.000	DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								613.000.000					613.000.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								600.000.000					600.000.000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		160 Orang		600.000.000	DBH CHT		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	600.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Ha sil Ke gia tan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							13.000.000					13.000.000	
2	0	0	2.0	0	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		- Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa		20 Lembag a		13.000.000	DAU		Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20 Lembag a	13.000.000
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							425.000.000					425.000.000	
2	0	0	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							398.000.000					398.000.000	
2	0	0	2.0	0	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		- Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa		200 Orang		88.000.000	DAU		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatka n Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 Orang	88.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capai an Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Ha sil Ke gia tan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dan a		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
2	0	0	2.	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan		- Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa		480 Orang		10.000.000	DAU		Jumlah pencari kerja yang mendapatk an penyuluhan dan bimbingan jabatan	480 Orang	10.000.000
2	0	0	2.	0	Penyelenggara an Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerja an		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		- Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa		10 Orang		50.000.000	DAU		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatk an Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	50.000.000
2	0	0	2.	0	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		- Kab. Temang gung, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa		75 orang		250.000.000	DBH CHT		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayak an Melalui program Perluasan Kesempata n Kerja	75 orang	250.000.000
2	0	0	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota								27.000.000					27.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4 Orang		27.000.000	DAU		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	4 Orang	27.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								80.000.000					80.000.000
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								80.000.000					80.000.000
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Perkara		80.000.000	DAU		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	80.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								403.670.713					403.670.713
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								343.670.713					343.670.713
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								343.670.713					343.670.713
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		18.670.713	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	18.670.713
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		325.000.000	DBH CHT		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	325.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								60.000.000					60.000.000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								60.000.000					60.000.000
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		60.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui (SIINas)	1 Dokumen	60.000.000
					JUMLAH								8.222.582.512					8.222.582.512

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 97,62 % dari total pagu Rp. 8.464.323.839,- telah terealisasi sebesar 8.263.164.798,- , sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 42,83 %, dari total pagu Rp. 8.492.472.749,- telah terealisasi sebesar 3.637.487.640,-

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.222.582.512,- yang terdiri dari 6 (enam) program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 5 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660712 199403 2 006